

Gagasan dan Pemikiran Muhammadiyah Tentang Kaderisasi Ulama (Studi Kasus tentang Ulama di Muhammadiyah)¹

Muh. Isnanto

Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia
Email: mas_nanto@yahoo.com

Abstrak. Pendidikan Islam bukan sekedar proses penanaman nilai-nilai moral untuk membentengi diri dari eksekusi negatif globalisasi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai moral yang telah ditanamkan pendidikan Islam mampu berperan sebagai kekuatan pembebas (*liberating force*) dari himpitan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan sosial budaya dan ekonomi (*Syafi'i Ma'arif*). Ada kegelisahan terhadap pengkaderan ulama di kalangan pengasuh dan pendidik sehingga muncul pertanyaan "akan dibawa kemana pemikiran kaderisasi ulama ini?" atau "bagaimana sistem pengkaderannya?". Ghirah pengkaderan adalah mencetak ulama sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan berkeadaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Muhammadiyah memang sedang terjadi krisis ulama, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi krisis da'i, yaitu kiris ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan ada 2 yaitu faktor internal bersifat kelembagaan. Kurang berfungsinya struktur kelembagaan di persyarikatan Muhammadiyah menyebabkan tidak berfungsinya lembaga-lembaga yang ada mulai dari tingkat Pusat hingga tingkat ranting. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pembentukan pola pikir yang ditinggalkan pemerintah kolonial, menguatnya tarikan dan kepentingan politik yang masuk ke lingkungan Persyarikatan serta standar ulama di Muhammadiyah terlalu tinggi, sehingga tidak banyak yang bisa masuk kategori ini. Ketiga, *problem solving* untuk mengatasi terjadinya krisis Ulama di Muhammadiyah melalui kelembagaan maupun sosial. Secara kelembagaan, adanya kesadaran kolektif akan pentingnya pengkaderan ulama, dan secara sosial adanya kesadaran warga Muhammadiyah akan pendidikan kader ulama.

Kata kunci: Gagasan, pemikiran dan kaderisasi ulama.

A. Pendahuluan

Pada dua bulan terakhir ini masyarakat Indonesia dipertontonkan peristiwa-peristiwa keagamaan. Kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Permana Gubernur DKI Jakarta menjadi isu terhangat terhadap peristiwa keagamaan dimaksud. Rentetan peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh umat Muslim pada bulan 4 November 2016 (411) dan 2 Desember 2016 (212) merupakan bentuk kepedulian umat Muslim dalam menjaga kesucian al Qur'an. Pada 2 (dua) peristiwa besar itu sebagaimana dilihat pada berita yang direlease media cetak maupun elektronik menunjukkan demo yang damai, membuktikan bahwa Islam itu *rahmatan lil 'alamin* sangat menonjol. Hal tersebut terjadi tidak lepas dari peran alim ulama dalam mengawal umat muslim melakukan aksi. Sehingga aksi yang digelar pada peristiwa tersebut bisa berjalan lancar dan damai.

¹ Artikel ini adalah hasil penelitian yang didanai oleh Balai Penelitian Keagamaan Semarang dan sudah diseminarkan di Hotel Hotel Kosambi pada tanggal 19 s.d. 21 Desember 2016

Membahas tentang peran ulama dalam keberlangsungan Negara Kesatuan Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Bahkan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo dalam sebuah acara ILC di TV One pada tanggal 8 November 2016 menyampaikan bahkan kekuatan umat Islam adalah sebagai benteng terakhir untuk penegakan NKRI, menjaga Pancasila dan UUD 1945 serta menjaga kebhinekaan. Dari statemen Panglima TNI ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran ulama dalam mempersatukan umat di saat umat Muslim mendapat dan atau mengalami penindasan. Peran ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta organisasi keagamaan lainnya mempunyai andil yang sangat besar dalam menyejukkan umatnya.

Dengan penting dan dibutuhkannya ulama dalam menjaga ukhuwah dan ketentraman umatnya, Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan terbesar menganggap kebutuhan ulama menjadi skala utama. Hal ini sebagai akibat dari adanya anggapan bahwa di Muhammadiyah telah terjadi krisis ulama. Menurut Prof. Yunahar Ilyas, sebenarnya krisis ulama di Muhammadiyah sudah mulai dirasakan sejak Mukhtamar Muhammadiyah di Surakarta tahun 1985. Hal ini menjadi keprihatinan pemikiran di kalangan tokoh-tokoh Muhammadiyah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pendidikan Islam bukan sekedar proses penanaman nilai-nilai moral untuk membentengi diri dari eksek negatif globalisasi. Tetapi yang paling urgen adalah bagaimana nilai-nilai moral yang telah ditanamkan pendidikan Islam tersebut mampu berperan sebagai kekuatan pembebas (*liberating force*) dari himpitan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan sosial budaya dan ekonomi (Syafi'i Ma'arif). Kandungan materi pelajaran dalam pendidikan Islam yang masih berkuat pada tujuan yang lebih bersifat ortodoksi diakibatkan adanya kesalahan dalam memahami konsep-konsep pendidikan yang masih bersifat dikotomis; yakni pemilahan antara pendidikan agama dan pendidikan umum (*sekuler*), bahkan mendudukkan keduanya secara diametral. Dari pendidikan Islam yang masih cenderung bersifat dikotomis yang selama ini terpisah secara diametral, yakni pendidikan yang hanya menekankan dimensi transendensi tanpa memberi ruang gerak pada aspek *humanisasi* dan *liberasi* dan atau sebaliknya pendidikan Islam yang hanya menekankan dimensi *humanisasi* dan *liberasi* dengan mengabaikan aspek *transendensi*. Dalam teori sosialnya Kuntowijoyo (alm) dikenal dengan Ilmu Sosial Profetik.

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka pengkaderan ulama di kalangan pengasuh dan pendidik ada kegelisahan sehingga muncul pertanyaan tentang "akan dibawa kemana pemikiran kaderisasi ulama ini?" atau "bagaimana sistem pengkaderannya?" .oleh karena itu *Ghiroh* pengkaderan ulama adalah mencetak ulama sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan berkeadaban, tentunya misi dan tugas utamanya adalah melanjutkan kepemimpinan para Nabi, yakni menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran, maka ulama harus memenuhi kualifikasi: mampu memimpin perjuangan menegakkan misi kenabian tersebut.

Dua kualifikasi unggulan yang wajib dimiliki ulama adalah kualifikasi ilmu dan akhlak. Untuk itu, seorang ulama harus memahami misi kenabian dengan baik; paham ulumuddin dengan baik; paham pemikiran Islam; paham pemikiran-pemikiran kontemporer; dan paham strategi serta taktik perjuangan di zamannya. Sebagaimana para nabi, ulama sepatutnya mendapatkan hikmah dari Allah, sehingga dia bukan hanya paham ilmu-ilmu keislaman dengan baik, tetapi dia juga bisa menerapkannya dengan penuh hikmah.

Maka, kualifikasi akhlak yang wajib dimiliki ulama adalah sikapnya yang hanya takut kepada Allah, tidak *hubbud-dunya*, apalagi sampai gila jabatan dan gila hormat. Aneh kalau ulama sampai punya ambisi pribadi untuk menjadi pemimpin umat atau organisasi, padahal ia tahu, betapa beratnya pertanggungjawaban dia di akhirat nanti. Memang, al-Quran surat al-Ahzab ayat 72 menggambarkan sifat kebanyakan manusia yang zhalim dan bodoh, terkait dengan kemauan manusia untuk mengemban amanah. Logika sehat kita mengatakan betapa bodohnya manusia yang memaksakan diri mengemban amanah yang sangat berat, padahal, ia tahu ada orang lain yang lebih baik dan lebih mampu memimpin dibandingkan dirinya.

Oleh sebab itu pendidikan kader ulama menjadi sebuah keniscayaan di Muhammadiyah dengan memadukan ilmu umum dan agama secara umum di lingkungan masyarakat. Kalau merunut sejarah memang sangat sulit melacak kapan secara persis mulai terjadinya penyebaran literatur keagamaan (kitab agama Islam) di Indonesia. Historiografi tradisional mencatat berbagai catatan lokal maupun asing tentang penyebaran literatur tersebut, walaupun secara persis tidak mencatumkan judul-judulnya. *Hikayat raja-raja Pasai, Sejarah Melayu* dan kitab undang-undang di beberapa kesultanan mencatumkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah syari'ah atau fikhiyah yang diambil dari madhab *Imam Syafi'i* walaupun tidak mencatumkan rujukannya. (Azra, 2002: 112)

Lain dari pada itu penyebaran literatur keagamaan klasik selanjutnya diteruskan oleh para ulama melalui pengajian di rumah atau lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren, manasah, surau, rangkang dan lainnya. Di tempat-tempat tersebut kitab-kitab klasik terus dipelajari dan dikembangkan dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan menyebarkan ajaran Islam di nusantara. Dan untuk itu tidak aneh kalau hubungan literatur klasik (kitab kuning) dengan pesantren tidak bisa dipisahkan, bahkan sampai saat ini masih tertanam anggapan masyarakat bahwa pesantren identik dengan kitab kuning.

Menteri Agama dr. Tarmizi Tahir pernah mengatakan tentang kitab kuning "Pedoman Umat Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis, namun kupasan dan tafsir para ulama yang dituangkan dalam kitab-kitab kuning akan memperluas wawasan dan memperkaya alternatif bagi umat Islam untuk memahami dan melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Oleh karena itu pemikiran-pemikiran yang ada dalam kitab kuning seringkali mewarnai praktek keagamaan umat baik yang menyangkut peribadatan, sosial, perekonomian maupun hukum Islam. (Mustofa, 2001: 186-187)

Oleh karena itu, berdasar uraian di atas maka peran Muhammadiyah salah yang satu diantaranya adalah sebagai agen pencetak umat yang berakhlak mulia dalam menghadapi perubahan sosial, maka elemen-elemen yang ada didalam termasuk dalam hal ini yang terkait dengan lembaga pengkaderan ulama dituntut untuk mampu memainkan perannya secara dinamis dan proaktif. Kehadirannya diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi yang berarti bagi perbaikan ummat Islam, baik pada dataran intelektual teoritis maupun praktis.

Berdasar pada latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, bagaimana madrasah Mu'allimin mensikapi kehidupan keagamaan. Oleh karena itu pada kesempatan penelitian ini dengan berlatar ragam di atas, kami mencoba untuk mengangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul Gagasan dan Pemikiran Muhammadiyah Tentang Kaderisasi Ulama (Studi Kasus Tentang Krisis Ulama Di Muhammadiyah)

Berdasar pada uraian di atas, disadari atau tidak bahwa perkembangan kehidupan keagamaan dengan segala problemanya menuntut adanya tokoh-tokoh ulama yang bisa menjadi teladan bagi umatnya, sehingga pengkaderan ulama dirasa perlu. Oleh Karen itu yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pemikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah tentang krisis Ulama yang ada di Muhammadiyah?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya anggapan terjadi krisis Ulama di Muhammadiyah, mengapa?
3. Bagaimana *problem solving* untuk mengatasi terjadinya krisis Ulama di Muhammdiyah tersebut?

Kemudian tujuan dan manfaat penelitian ini dengan berdasar pada permasalahan tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran tokoh Muhammadiyah terkait dengan krisis ulama, apa faktor penyebabnya dan bagaimana pemecahannya. Penelitian ini diharapkan pula dapat menggambarkan secara utuh penyelesaiannya sehingga bisa dijadikan model bentuk pengkaderan ulama. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai instrument pengambilan kebijakan dalam rangka membina, mengembangkan dan kaderisasi ulama.

Untuk dapat memotret dan menganalisis kasus ini maka Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana mensikapi kondisi kehidupan keagamaan dengan realitas instrumen pendukungnya dalam hal ini ketersediaan ulama. Jika melihat pada latar belakang masalah di atas, peran ulama bisa membawa kepada kesejukan hubungan antar umat, kerukunan dan juga kedamaian. Pengembangan kerukunan hidup beragama bisa menjadi coreng moreng akibat konflik sosial yang sedikit banyak melibatkan agama, seperti penodaan agama, gagasan tentang “membangun inklusivisme dalam dialog antara agama”, “beragama yang tidak anarkis”, “beragama yang toleran dan humanis”, “dialog antar agama dalam figura humanisme” dan sebagainya. Penelitian ini mendasarkan studinya atas kerangka kerja yang bertumpu pada pendekatan kearifan organisasi keagamaan. Pilihan terhadap perspektif ini didasarkan pada kendala penelitian mengenai pengembangan atau pemberdayaan masyarakat secara luas yang selama ini diterapkan, pada umumnya cenderung lebih dilihat dari perspektif peneliti, yakni bersifat *etik*; sementara -tidak menutup kemungkinan kendala itu justru muncul dari kondisi obyektif yang terdapat dalam internal masyarakat itu sendiri, sehingga memungkinkan untuk dilihat dari perspektif masyarakat yang diteliti, yakni bersifat *emik*, yaitu menggunakan cara-cara pelukisan menurut pandangan atau makna yang diberikan oleh masyarakat pendukung kebudayaan, bukan perspektif *etik* menggunakan cara-cara pelukisan yang secara universal dipakai dalam dunia antropologi (Ahimsa-Putra, 1986: th).

Oleh karena didasarkan pada perspektif peneliti, maka seringkali program-program yang ditawarkan kepada masyarakat hanya efektif pada saat peneliti berada di lapangan. Program-program itu, selanjutnya, akan sirna ditelan waktu bersamaan dengan berakhirnya masa pelaksanaan penelitian tersebut. Hal itu disebabkan karena program-program tersebut dianggap bukan bagian dari milik masyarakat setempat yang sejatinya harus menyentuh kesadaran kognitif mereka. Kapasitas peran peneliti dalam model pendekatan ini hanya sebatas sebagai mediator atau pendamping. Disamping itu, pilihan terhadap perspektif ini juga dilandasi oleh cakupan analisisnya yang bersifat komprehensif, sehingga memungkinkan permasalahan yang diamati melibatkan berbagai perspektif ilmu, di antaranya Soemarwoto (1994: 56).

Secara definitif, pendidikan profetik dapat dipahami sebagai seperangkat teori yang tidak hanya mendeskripsikan dan mentransformasikan gejala sosial, dan tidak pula hanya mengubah suatu hal demi perubahan, namun lebih dari itu, diharapkan dapat mengarahkan perubahan atas dasar cita-cita etik dan profetik. Kuntowijoyo sendiri memang mengakuinya, terutama dalam sejarahnya Islamisasi Ilmu itu - dalam rumusan Kunto- seperti hendak memasukan sesuatu dari luar atau menolak sama sekali ilmu yang ada². Dia mengatakan: “saya kira keduanya tidak realistis dan akan membuat jiwa kita terbelah antara idealitas dan realitas, terutama bagi mereka yang belajar ilmu sosial barat. *Bagaimana nasib ilmu yang belum di Islamkan? Bagaimana nasib Islam tanpa Ilmu?* Dengan ungkapan seperti ini, Kuntowijoyo tidak bermaksud menolak *Islamisasi ilmu*, tapi selain membedakan antara ilmu sosial profetik dengan Islamisasi Ilmu itu sendiri, juga bermaksud menghindarkan pandangan yang bersifat dikotomis dalam melihat ilmu-ilmu Islam dan bukan Islam.

Secara normatif-konseptual, paradigma profetik versi Kuntowijoyo (alm) didasarkan pada Surar Ali-Imran ayat 110 yang artinya: “*Engkau adalah ummat terbaik yang diturunkan/dilahirkan di tengah-tengah manusia untuk menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kemunkaran dan beriman kepada Allah*”.

Terdapat tiga pilar utama dalam ilmu sosial profetik yaitu; amar ma’ruf (*humanisasi*) mengandung pengertian memanusiakan manusia. nahi munkar (*liberasi*) mengandung pengertian pembebasan. dan tu’minuna bilah (*transendensi*), dimensi keimanan manusia. Selain itu dalam ayat tersebut juga terdapat empat konsep; *Pertama*, konsep tentang ummat terbaik (*The Chosen People*), ummat Islam sebagai ummat terbaik dengan syarat mengerjakan tiga hal sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Ummat Islam tidak secara otomatis menjadi *The Chosen People*, karena ummat Islam dalam konsep *The Chosen People* ada sebuah tantangan untuk bekerja lebih keras dan ber-*fastabiqul khairat*. *Kedua*, aktivisme atau praksisme gerakan sejarah. Bekerja keras dan ber-*fastabiqul khairat* ditengah-tengah ummat manusia (*ukhrijat Linnas*) berarti bahwa yang ideal bagi Islam adalah keterlibatan ummat dalam percaturan sejarah.

Pengasingan diri secara ekstrim dan kerahiban tidak dibenarkan dalam Islam. Para intelektual yang hanya bekerja untuk ilmu atau kecerdasan *an sich* tanpa menyapa dan bergelut dengan realitas sosial juga tidak dibenarkan. *Ketiga*, pentingnya kesadaran. Nilai-nilai profetik harus selalu menjadi landasan rasionalitas nilai bagi setiap praksisme gerakan dan membangun kesadaran ummat, terutama ummat Islam. *Keempat*, etika profetik, ayat tersebut mengandung etika yang berlaku umum atau untuk siapa saja baik itu individu (mahasiswa, intelektual, aktivis dan sebagainya) maupun organisasi (gerakan mahasiswa, universitas, ormas, dan orsospol), maupun kolektifitas (jama'ah, ummat, kelompok/paguyuban). Point yang terakhir ini merupakan konsekuensi logis dari tiga kesadaran yang telah dibangun sebelumnya. (Moh. Shofan, tt: 365)

Kemudian terkait dengan faktor, secara umum faktor yang menyebabkan perubahan ada 2 yaitu, faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri yang disebut dengan pertama, *internal factor* atau yang sering disebut dengan *endogen*, yaitu aspirasi dan pikiran manusia sebagai anggota kelompok, selalau berkembang. Dorongan utama perubahan kebudayaan timbul karena adanya penemuan baru (innovation). Penemuan baru akan diterima jika masyarakat yang bersangkutan menganggapnya dapat dengan resmi diintegrasikan ke dalam kebudayaannya. Tapi tidak semuanya dapat diterima oleh suatu kelompok masyarakat, bahkan kadang-kadang akan ditolak secara sengit jika dianggap bertentangan dengan tat nilai budaya mereka yang mapan.

Kedua, faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat yang disebut dengan *external factor* atau faktor eksogen, yaitu faktor-faktor dari luar kelompok yang besar pengaruhnya terhadap perubahan sosial, misal lingkungan alam/fisik di sekitar manusia, terjadinya bencana alam seperti letusan gunung Merapi di Yogyakarta, terjadinya perang dan pengaruh budaya bangsa lain. Jadi pada dasarnya, proses perubahan sosial berlangsung kompleks. Akan sangat sulit mengatakan bahwa salah satu aspek seperti agama, memiliki peranan dan respon yang paling berpengaruh dalam perubahan itu. Untuk kepentingan ini, agama sering kali disebut sebagai faktor pendorong tetapi juga penahan terhadap perubahan. Dan kadang-kadang dalam situasi tertentu, agama secara simultan bereaksi sebagai pendorong dan penahan sekaligus.

Pengembangan konsep operasional melalui pemanfaatan mekanisme sosial budaya unit gerakan pembangunan, juga perlu dikaji substansi institusi sosialnya. Hal ini dimaksudkan agar dalam pemanfaatannya memperoleh institusi yang efisien dan efektif serta tidak menimbulkan gejolak dalam proses perubahan dan transformasi sosialnya. Sistem interaksi sosial di masyarakat dapat ditinjau sekurangnya dari tiga perspektif yang berbeda : *pertama*, hubungan antara orang dalam dengan orang luar, *kedua*, hubungan antara orang dalam yang memiliki kedudukan berbeda dan yang *ketiga*, hubungan antara orang-orang dalam yang memiliki kedudukan yang sama (Horton dan Hunt, 1996 : 340).

Teori fungsional melihat manusia dalam masyarakat sebagai ditandai oleh dua tipe kebutuhan dan dua jenis kecenderungan bertindak. Demi kelanjutan hidupnya, manusia harus bertindak terhadap lingkungan, baik dengan cara menyesuaikan diri pada lingkungan itu atau menguasai dan mengendalikannya. Masyarakat manusia, beserta kebudayaan yang merupakan sarana survival manusia dan masyarakat, sering membutuhkan kematian sebagian anggota demi kelanjutan hidup mereka. Sejarah kemanusiaan menunjukkan bahwa kemampuan manusia untuk mengendalikan lingkungan dan mempengaruhi kondisi lingkungannya selalu meningkat. Tetapi manusia bukan hanya pembuat benda dan manipulator kondisi lingkungan. Kegiatan manusia bukan hanya kegiatan yang bersifat penyesuaian dan manipulasi. Manusia juga mengungkapkan perasaan, bertindak melaksanakan kebutuhan yang dirasakan, menanggapi orang dan benda dengan cara yang non utilitarian dan terlibat dalam hubungan – hubungan. Sebagaimana dinyatakan oleh sosiolog Amerika George C. Homans, manusia tidak pernah mencurahkan dirinya pada “ kegiatan, interaksi dan sentimen “ yang perlu bagi kelanjutan hidup kelompok, tetapi menyempurnakan unsur – unsur ini jauh melampaui berbagai kebutuhan kelangsungan hidup. Manusia juga mempunyai kebutuhan mengungkapkan, dan dalam tugas – tugas mencari penyelesaian masalah, ia menjalankan hubungan di antara sesama dan dengan situasi. Sebenarnya psikolog modern telah

menunjukkan, yang ternyata kita jumpai dalam rekaman sejarah manusia, sifat penting kebutuhan pengungkapan itu (O’dea, 1996: 7).

Teori fungsional juga menumbuhkan perhatian kita pada sumbangan fungsional agama yang diberikan terhadap sistem sosial. Agama dengan kedekatannya pada sesuatu yang berada diluar jangkauan dan keyakinannya bahwa manusia berkepentingan pada sesuatu yang diluar jangkauan itu telah memberikan suatu pandangan realitas supra – empiris menyeluruh yang lebih luas. Konteks realitas ini, kekecewaan dan frustrasi yang dibebankan oleh ketidakpastian dan ketidakmungkinan dan oleh tatanan masyarakat manusia yang telah terlembaga, akan terlihat dalam berbagai pengertian yang ultima sebagai bermakna dan ini memungkinkan penerimaan dan penyesuaian dengannya. Apalagi dengan memperlihatkan norma dan peraturan masyarakat sebagai bagian dari tatana etis supra – empiris yang lebih besar, telah ditetapkan dan disucikan oleh kepercayaan dan praktek beragama, maka agama dalam hal ini telah mendorong penguatan pelaksanaannya, bila ternyata tindakan umat bertentangan dengan keinginan atau kepentingan undang – undang atau norma tersebut. Dengan demikian yang teratasi tidak saja frustrasi kognitif, yang memang terkait dalam permasalahan makna ini, tetapi juga memperlancar penyesuaian emosional terhadap frustrasi dan deprivasi yang melekat dalam hidup dan masyarakat manusia. (O’dea, 1996: 12).

Lebih lanjut, menurut pandangan struktur fungsional, bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Teori ini berasumsi bahwa setiap elemen (struktur) dalam sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lain. Teori ini dimantapkan oleh Parsons, sebelumnya dipengaruhi Durkheim, Comte dan Louis De Bonald. (Soelaiman, 1998: 63)

B. Metode Penelitian

Penelitian kasus ini dilakukan di Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa pertama, Yogyakarta sebagai tempat lahir, pusat berdiri dan berkembangnya Muhammadiyah; Kedua, banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang tinggal di Yogyakarta, dan Ketiga, adanya lembaga kader yang letaknya sangat strategis sehingga mudah dijangkau oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *deskriptif analitik*, yaitu mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat (warga Muhammadiyah) dalam situasi tertentu, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Maka penelitian ini akan mencatat seluruh kajian yang terkait dengan pemikiran-pemikiran dan gagasan para tokoh yang dijadikan informan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, sesuai dengan sifat dan kelompok data :
a). Wawancara Mendalam. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik *unstructured* atau *focused interview*, yaitu wawancara yang difokuskan pada suatu pokok persoalan tertentu terhadap informan yang terdiri dari tokoh Muhammadiyah, pimpinan lembaga, dan warga Muhammadiyah. b). dokumentasi, c). Observasi. Untuk melengkapi cara dan teknik pengambilan data di atas, observasi dilakukan dalam rangka mengamati interaksi sosial yang terjadi di lingkungan pesantren sebagai lembaga kader.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemikiran Tokoh tentang Ulama Muhammadiyah

a) Krisis Ulama menurut Tokoh Muhammadiyah

Bangsa Indonesia sampai saat ini masih belum dapat menuntaskan persoalan-persoalan sebagai amanat reformasi, seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain karena warga dan para pejabat publik

serta pemimpinnya kehilangan kejujuran dan amanah, Oleh karena itu umat Islam Indonesia diharapkan dapat meneladani sikap Nabi Muhammad dalam hal jujur dan amanah.

Merujuk pada persoalan itu maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kejujuran dan amanah pada dasarnya harus menjadi kesadaran bersama bangsa Indonesia sehingga menciptakan budaya kolektif. Nabi Muhammad SAW harus dijadikan *uswah hasanah* atau teladan yang baik dalam membangun peradaban. Muslim Indonesia pada umumnya dan para ulama pada khususnya harus dapat menjadikan Islam sebagai *din al-badlarah* atau menjadi agama peradaban berkemajuan. Umat Islam tidak boleh menjadi umat yang lemah dan tertinggal, namun harus menjadi *khayra ummah* atau umat unggulan. Jika ingin merebut peradaban maka umat Islam harus berkemajuan. Sehingga sintesis antara umat atau bangsa berkarakter mulia dan berkemajuan menjadi kepentingan utama umat Islam dan bangsa Indonesia dalam meneladani Nabi akhir zaman.

Itulah kiranya yang menjadi pemantik kesadaran para tokoh Muhammadiyah melihat bahwa telah terjadi krisis ulama. Krisis ulama di persyarikatan Muhammadiyah menjadi perhatian yang serius di kalangan tokoh-tokoh Muhammadiyah meski pendapat terhadap krisis ulama ini sangat beragam, sebagian tokoh menyatakan krisis tapi ada juga yang menyatakan tidak sampai ke level krisis. Kekurangan ulama Muhammadiyah bisa saja, akan tetapi tidak sampai pada level krisis. Hanya saja, saat ini kebutuhan persyarikatan akan ulama atau fakih jauh lebih meningkat, terutama ulama kharismatik yang memiliki kedalaman ilmu syariat, memahami dan menghargai paham fikih Muhammadiyah, dan memiliki pemahaman yang baik pada persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungannya.

Fenomena akan realita kekurangan ulama di kalangan Muhammadiyah ini mau tidak mau berimbas terhadap kurangnya pembinaan anggota Muhammadiyah, terlebih pada tingkat ranting. Menurut Ust. Wahyudi Abdurrahim yang juga merupakan mantan Ketua PCIM Mesir, menyebutkan bahwa salah satu alasan kosongnya pengajian di tingkat ranting, bukanlah karena tidak ada jamaah, melainkan karena tidak adanya ustadz/da'i pengampu. Jika ustadz/da'i pengampu saja tidak ada, maka bisa dipastikan alim ulama juga tidak ada.

Hal di atas diperkuat kondisi riil yang terjadi di daerah Prambanan Kabupaten Sleman tepatnya di desa Bokoharjo kecamatan Prambanan bahwa sebagian warga Bokoharjo banyak warga yang tubuhnya bisa jadi Muhammadiyah, tapi ruhnya bisa jadi telah pudar. Hal ini menjadi keprihatinan Ustadz Nashir, menurutnya perilaku warga Muhammadiyah yang demikian itu bisa terjadi karena tidak adanya komunikasi dakwah yang dilakukan oleh Ustadz/da'i setempat dengan warga. Bentuk keprihatinan Ustadz Nashir itu pada akhirnya memantik kepedulian dengan melakukan sedikit demi sedikit sebuah gerakan dakwah dengan penuh kesabaran dan ketekunan terhadap warga Muhammadiyah yang tidak tahu harus melakukan apa dan kemana, maka gerakan dakwah yang dirintis oleh Ustadz Nashir menghasilkan sebuah tatanan kehidupan bagi warga Bokoharjo, dimana sebagaimana beliau sampaikan bahwa 100 % warga Muhammadiyah di wilayah tersebut pada saat ini tidak ada yang meninggalkan persyarikatan Muhammadiyah. Beliau bilang rumusnya sangat sederhana, yaitu warga bawah butuh komunikasi dakwah dan perhatian dari pusat. Dalam mempertegas kondisi ini Ustadz Nashir menyampaikan bahwa:

“Warga Muhammadiyah desa Bokoharjo dulu banyak yang tidak perhatian terhadap persyarikatan Muhammadiyah, banyak warga yang ikut pengajian-pengajian di kelompok keagamaan lain. Tapi setelah saya terketuk hati untuk memberikan sedikit ilmu saya dengan mengajak warga mengadakan Majelis ta'lim belajar bersama dengan warga, warga merasa senang dan apresiatif. Meski pada awal merintis yang mengikuti sedikit dan itupun tidak diadakan di satu tempat, saya tetap melakukan dakwah meski sampai ke ujung kampung, Alhamdulillah hasilnya dapat dirasakan sekarang, 100% warga Muhammadiyah sudah kembali ke habitatnya, yang sebelumnya di kelompok-kelompok lain”. (*hasil wawancara pada tanggal 6 Desember 2016*)

Berdasar pada pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa jika masing-masing majlis ataupun lembaga pengembangan dapat melakukan fungsinya dengan baik sebagai akibatnya adalah warga Muhammadiyah di tingkat bawah merasa diperhatikan dan merasa dimiliki, dan sebaliknya jika lembaga tidak

memperhatikan dan tidak menjalankan fungsinya dengan baik akibatnya warga merasa kurang mendapat perhatian dari pusat dan akhirnya mudah terpengaruh dengan dakwah yang lain. Dengan kondisi yang demikian ini, maka warga Muhammadiyah dimanfaatkan oleh kelompok lain yang notabene baru dengan memberi perhatian dan kemudian mengambil hati warga Muhammadiyah untuk menjadi bagian dari kelompoknya. Kondisi yang seperti inilah yang menjadi keprihatinan para tokoh-tokoh yang ada di daerah tersebut. Kalau sudah demikian sama sebagaimana disampaikan di atas banyak warga yang tubuhnya bisa jadi Muhammadiyah, tapi ruhnya bisa jadi telah pudar.

Realitas tersebut di atas mengisyaratkan meskipun sulit diterima, hal itu mengandung sebuah kenyataan bahwa dalam tubuh Muhammadiyah dapat dibilang disamping terjadi krisis ulama, juga terjadi krisis da'i. Jikalau memang adanya seperti itu, kondisi yang demikian itu sangat memprihatinkan. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf-nahi munkar, dengan gaung motto kembali kepada al-Qur'an dan sunnah. Jangankan berbicara pada level kembali kepada al-Qur'an dan sunnah, atau amar ma'ruf nahi mungkar yang jelas-jelas membutuhkan praktek lapangan dengan ulama yang sangat mumpuni. Bicara dakwah Islamnya saja, Muhammadiyah masih kekurangan da'i. Meskipun begitu, memang harus diakui kurangnya da'i ini sebenarnya juga dikarenakan ladang dakwah Muhammadiyah dan jumlah jamaahnya yang begitu banyak. Kurang lebih 50 juta orang, dan akan terus bertambah. Hal ini tentu sangat membanggakan, tapi sekaligus mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan jika Muhammadiyah sendiri sampai tidak bisa mengkader, meregenerasi, men-*supply* kader ulama atau bahkan da'i hingga tingkat ranting.

b) Konsep Ulama yang Ideal menurut Tokoh Muhammadiyah

Ada beberapa pendapat terkait dengan ulama yang ideal menurut tokoh Muhammadiyah. Ust. Fahmi, ulama Muhammadiyah yang ideal itu mereka yang memenuhi kriteria berikut:

- a. Menguasai ilmu-ilmu syariah;
- b. *Khasyatullah* (takut kepada Allah);
- c. Aktif membimbing dan memperjuangkan kepentingan umat;
- d. Aktif di Persyarikatan Muhammadiyah.

Sedangkan menurut Asep, beliau menjelaskan bahwa ulama Muhammadiyah yang ideal adalah ulama yang mampu membaca kitab kuning dan kitab putih. Hal ini juga diamini oleh Prof. Syamsul Anwar yang merupakan Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Yang dimaksud dengan kitab putih adalah buku-buku yang berkaitan dengan ilmu alam. Artinya, ulama Muhammadiyah itu seyogyanya tidak hanya berbicara tentang fikih, ushul fikih, tafsir, dan hadis, tetapi juga berbicara tentang sosiologi, politik dan sebagainya.

Kemudian konsep ulama menurut Muhammadiyah menurut Ustadz Nashir bahwa selama ini pengertian ulama menurut Muhammadiyah adalah Tajdid, purifikasi dan dinamis. Beliau menambahkan konsep ulama ideal di Muhammadiyah tidak cukup hanya itu. Akan tetapi ulama ideal Muhammadiyah harus menjadi ulama Intelektual dan intelektual ulama. Yang dimaksud dengan ulama intelektual adalah seorang ulama yang tidak hanya cukup ahli dalam bidang agama, akan tetapi juga harus ahli dalam bidang ilmu umum (alam). Sedangkan yang dimaksud dengan intelektual ulama adalah seorang tidak hanya cukup ahli dalam bidang ilmu umum (alam) akan tetapi juga harus ahli dalam bidang agama. Sebagai representasi tokoh saat ini yang dapat dicontohkan sebagai ulama intelektual salah satunya adalah Prof. Dr. Yunahar Ilyas, sedangkan yang dicontohkan sebagai intelektual Ulama adalah Prof. Dr. Amin Rais. Dengan demikian menurut para tokoh Muhammadiyah pada prinsipnya keahlian pengetahuan agama dan umum, menggabungkan keduanya dan tanpa mengabaikan salah satunya menjadi satu keharusan..

Menindaklanjuti uraian di atas terkait dengan figur ulama Muhammadiyah, Ustadz Fahmi Salim mengatakan bahwa beliau merindukan figur ulama seperti Kiai Dahlan, Kiai Mas Mansur, Buya Hamka, Kiai AR Fachrudin, Kiai Azhar Basyir, dan profil-profil lainnya, yang mumpuni dan disegani di kanc

nasional maupun internasional. Karakter ilmu dan integritas moral keulamaan mereka lah yang dibutuhkan untuk memajukan dan menjunjung martabat Muhammadiyah di masa depan, tentunya dengan sentuhan medan jihad yang lebih modern dan menantang. Di samping itu, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dengan jargon kembali kepada al-Qur'an dan sunnah, dan itu hanya bisa digawangi oleh para ulama yang mengerti al-Qur'an dan sunnah dengan banyak perangkat.

Jadi kalau memang ulama menurut Muhammadiyah seperti itu dalam kondisi saat ini memang benar kalau dianggap krisis. yaitu ulama yang menjadi uswah, ulama yang menjadi keteladanan telah mengalami krisis. Bahkan kalau ditarik ke kehidupan social secara luas itu tidak hanya terjadi di persyarikatan Muhammadiyah. Fenomena gerakan 411 dan 212 yang dilakukan oleh umat Islam menunjukkan bahwa secara umum - nasional bisa terjadi demikian adanya, kondisi sosial masyarakat saat ini sangat memerlukan perhatian yang khusus dari para ulama. Dalam gerakan 411 dan 212 ibarat panggung orchestra ulama yang mempertontonkan peran dalam orchresta musik sesuai dengan iramanya masing-masing. Hal ini disebabkan karena ulama saat ini kalau membicarakan sesuatu melebihi kapasitasnya. Ulama yang semestinya tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui secara keilmuan tetap menyampaikan.

2. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Krisis Ulama di Muhammadiyah

Faktor-faktor penyebab terjadinya krisis ulama di Muhammadiyah ada 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dimaksud adalah faktor kelembagaan, faktor ini penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, selama ini Muhammadiyah terlalu fokus pada sekolah dan perguruan tinggi, namun belum mengimbangi secara maksimal dengan di-genjot-nya pendidikan keagamaan. Mungkin demikian, karena dengan banyaknya lembaga pendidikan, sekolah dan universitas Muhammadiyah, ternyata belum berbanding lurus dengan kaderisasi da'i yang bisa membimbing umat. Jangankan pengiriman da'i ke daerah terpencil, di perkotaan saja mencari da'i Muhammadiyah sudah sangat sulit.

Kedua adalah sikap pragmatisme warga Muhammadiyah. Menurut ustadz Nashir sikap pragmatisme umat, dimana kehidupan umat dalam kesehariannya mempunyai konsep hidup itu yang dekat dan dihadapi itu apa, tidak melihat bagaimana yang akan datang. Kondisi seperti ini sudah berlangsung lama, . dalam pendidikan misalnya, lembaga pendidikan Muhammadiyah yang terdapat disetiap tempat dapat dipastikan menjadi lembaga pendidikan yang favorit, mulai pendidikan dasar hingga perguruan Tinggi. Karena sudah mendapatkan label itu akhirnya melupakan output yang diharapkan.

Ketiga, mudahnya sebagian anggota yang tertarik pada paham gerakanlain tanpa memahami Muhammadiyah secara lebih mendalam;

Keempat, melemahnya spirit, militansi, karakter/identitas, dan visi gerakan pada sebagian anggota/kalangan di lingkungan Persyarikatan seperti rendahnya kiprah dalam menggerakkan Muhammadiyah;

Kelima, gejala menurunnya ketaatan dan komitmen pada misi, pemikiran, kebijakan, dan kepentingan Muhammadiyah baik yang menyangkut urusan paham agama maupun yang menyangkut pengabdian dan kiprah dalam menggerakkan/ membesarkan Muhammadiyah;

Keenam, melemahnya ikatan atau solidaritas kolektif yang ditandai oleh kurang berkembangnya ukhuwah, silaturahmi, dan sinergi antar anggota maupun antar institusi dalam Persyarikatan;

Ketujuh, Kecenderungan sebagian anggota Muhammadiyah termasuk yang berada di amal usaha yang lebih mengutamakan kiprahnya untuk membesarkan organisasi, usaha, dan kegiatan lain di luar Muhammadiyah, bahkan dengan cara memanfaatkan fasilitas milik Persyarikatan.

Dari faktor internal tersebut menunjukkan bahwa terjadi longgarnya penjagaan identitas dan ideologi gerakan, sehingga lemah dalam ikatan organisasi dan kolektivitas, melemahnya dinamika organisasi, mulai dirasakan kekurangan kader potensi untuk memenuhi kebutuhan kepemimpinan, dan terjadi perpindahan aktivitas-warga-kader persyarikatan ke jamaah lain

Sedangkan faktor eksternalnya lebih disebabkan kondisi sosial adalah sebagai berikut:

1. Adanya pola pikir masyarakat dalam pengembangan pemikiran yang dipengaruhi oleh peninggalan kolonial.
2. Menguatnya tarikan dan kepentingan politik yang masuk ke lingkungan Persyarikatan, termasuk dalam amal usaha, melalui para aktivis atau kegiatan partai politik;
3. Semakin banyaknya berbagai paham pemikiran dari luar yang berbeda dengan paham Muhammadiyah dan berusaha masuk ke dalam Muhammadiyah
4. Standar ulama di Muhammadiyah terlalu tinggi, sehingga tidak banyak yang bisa masuk kategori ini.
5. Kultur bahwa ulama itu harus bergelar kiai atau memakai simbol-simbol ulama seperti serban, peci putih, jubah, dan sebagainya. Padahal kultur itu relatif tidak ada di Muhammadiyah. Tetapi harus diakui, sejak dulu, sarjana yang menguasai ilmu syariah di Muhammadiyah lebih sedikit dibandingkan sarjana yang menguasai ilmu *kauniyah* (alam).

3. *Problem Solving* Mengatasi terjadinya Krisis Ulama di Muhammadiyah

Dengan melihat faktor-faktor tersebut di atas, Muhammadiyah sudah waktunya secara masif bergerak menanggulangi krisis da'i dan memperbanyak ulama. Jika hal itu tidak segera dilakukan, ruh Muhammadiyah di berbagai cabang, ranting, serta Amal Usaha Muhammadiyah bisa sirna, karena bisa 'diambil alih' oleh kader non-Muhammadiyah, itu dapat terjadi karena kader Muhammadiyah sendiri tidak ada atau tidak mampu mengelola. Dan seandainya itu betul-betul dibiarkan maka secara pelan-pelan, sadar atau tidak, ruh Muhammadiyah akan terlepas. Tubuhnya bisa jadi Muhammadiyah, tapi ruhnya bisa jadi telah pudar.

Selama ini usaha Muhammadiyah telah banyak melakukan usaha-usaha untuk membesarkan persyarikatan. Berbagai ragam revitalisasi baik itu revitalisasi kelembagaan maupun ideologi telah dilakukan.

1. Revitalisasi Teologis, menyangkut ikhtiar merekonstruksi atau menafsir ulang pemikiran-pemikiran dasar keagamaan (keislaman) dalam Muhammadiyah sebagaimana prinsip-prinsipnya tentang agama islam, dunia, ibadah sabilullah dan ijtihad.
2. Revitalisasi Ideologis, menyangkut penyusunan ulang dan penguatan system paham disertai langkah-langkah pelembagaannya yang menjadi landasan membangun kesadaran dan ikatan kolektif dalam memperjuangkan gerakan Muhammadiyah.
3. Revitalisasi Pemikiran, menyangkut upaya mengembangkan wawasan pemikiran seluruh anggota, termasuk kader dan pemimpin, baik mengenai format pemikiran Muhammadiyah sebagai gerakan islam yang bercorak dakwah dan tajdid, maupun dalam memahami permasalahan-permasalahan dan perkembangan kehidupan tingkat local, nasional, dan global. Dikotomi yang keras tentang pemikiran literal versus liberal, pemurnian versus pembaruan atau pengembangan, eksklusif versus inklusif, organisasi versus alam pikiran, structural versus cultural menggambarkan masih terperangkapnya sebagian kalangan dalam Muhammadiyah mengenai orientasi pemikiran pada wilayah orientasi atau paradigm yang sempit atau terbatas.
4. Revitalisasi Organisasi, berkaitan dengan perbaikan-perbaikan system pengelolaan kelembagaan persyarikatan seperti menyangkut penataan struktur dan fungsi organisasi, birokrasi, pengelolaan dan pelayanan administrasi, hingga pengembangan organisasi yang mengarah pada peningkatan kualitas, efiesnsi-efektivitas, dan menjadikan organisasi sebagai instrument gerakan untuk kemajuan dan pencapaian tujuan Muhammadiyah.
5. Revitalisasi Kepemimpinan, merupakan langkah penguatan kualitas fungsi efektivitas pimpinan persyarikatan diseluruh lini, termasuk di lingkungan organisasi otonom dan amal usaha, yang secara langsung menjadi kekuatan dinamik dalam menggerakkan Muhammadiyah.

6. Revitalisasi amal usaha, menyangkut pengembangan kualitas amal usaha Muhammadiyah diberbagai bidang yang dapat tumbuh diatas misi dan visi gerakan sekaligus dapat memenuhi hajat hidup masyarakat. Amal usaha Muhammadiyah bukan lading mencari nafkah bagi para penghuninya, tetapi harus menjadi sarana atau media dakwah dan perwujudan misi Persyarikatan.
7. Revitalisasi Aksi, menyangkut pengembangan model-model kegiatan atau aktivitas gerakan Muhammadiyah yang secara langsung dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas dengan misi dakwah dan tajdid seperti dalam pemberdayaan ekonomi kaum miskin, advokasi kaum marjinal dan tertindas, memperkuat, potensi dan peran masyarakat madani, advokasi lingkungan hidup, resolusi konflik gerakan anti kekerasan, gerakan anti korupsi, kegiatan-kegiatan pembinaan umat yang bercorak partisipatif, dan aktivitas social masyarakat lainnya semangat etos Al-Ma'un

Dari langkah-langkah yang telah dilakukan nampaknya pengembangan kader masih belum menjadi fokus perhatian. Focus kaderisasi ulama belum mendapatkan perhatian secara khusus. Dan inilah yang pada akhirnya para tokoh Muhammadiyah muncul kesadarannya untuk mencari solusi penyelesaian masalah terkait dengan kirisi ulama ini.

Pada tiga warsa terakhir terhitung sejak dasawarsa 70-80an dan dilanjutkan era 90an, Muhammadiyah dengan ghirohnya menggenjot kualitas pendidikan umum untuk memajukan persyarikatan. Kondisi ketika itu stok ulama Muhammadiyah masih cukup banyak. Namun dalam perjalanannya tampak kondisi sekarang sudah tidak seimbang lagi. Sarjana umum sudah kelebihan persediaan, sementara stok ulama menipis. Sehingga wajar para tokoh Muhammadiyah gelisah, dan pada Mukhtamar Muhammadiyah tahun ini mencuat kebutuhan untuk mengembalikan *equilibrium* SDM agama dan umum seperti di awal 90an. Dalam rangka menyelesaikan persoalan ulama di Muhammadiyah ini, ada beberapa langkah yang menjadi gagasan dan pemikiran para tokoh Muhammadiyah. Paling tidak terdapat 2 langkah sebagai solusinya yaitu secara Kelembagaan dan secara sosial. Secara kelembagaan, Muhammadiyah adanya kesadaran bersama akan pentingnya pengkaderan ulama. Dan secara sosial, adanya kesadaran warga Muhammadiyah akan pendidikan kader ulama

Pertama, secara kelembagaan, saat ini Muhammadiyah semakin menyebar dan berkembang, bukan saja di perkotaan, tetapi juga sampai ke pelosok pedesaan. Untuk itu, tersebarnya gerakan dakwah Muhammadiyah harus diikuti oleh penyebaran kader, da'i dan ulama Muhammadiyah. Untuk mengantisipasi kekurangan kader da'i dan ulama ini, menurut Prof. Syamsul Anwar, Muhammadiyah perlu menggunakan dan memperkuat dua langkah, yaitu langkah struktural dan pendidikan. Langkah structural, yaitu dengan memasukkan orang-orang berpotensi ke dalam struktur Muhammadiyah. Di Majelis Tarjih sendiri, menurut beliau terdapat empat ring:

- 1) Umur 80 Tahun ke atas.
- 2) 2. Generasi 60-70
- 3) 3. Generasi 40-50
- 4) 4. Generasi 20-40

Jadi anggota Majelis Tarjih ada yang masih muda, namun juga ada yang sudah senior. Ini merupakan upaya Majelis Tarjih dalam rangka kaderisasi ulama.

Kemudian langkah pendidikan, Muhammadiyah banyak mendirikan sekolah kader ulama seperti PUTM (Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah) dan pondok pesantren Muhammadiyah. Jika dilihat dari fungsinya, anggota PCIM Mesir sedikit banyak juga masuk ke dalam langkah ini, karena mayoritas kadernya menjalani kuliah agama di Universitas al-Azhar.

Kaderisasi ulama yang dilakukan dengan pengelolaan modern saat ini melalui Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (PP. MBS). Untuk kaderisasi ulama model yang diselenggarakan PP MBS ini sangat tepat. Didirikan pertama kali pada tahun 2008 dan saat ini santri yang terdaftar sebanyak 1750. Lembaga MBS ini terdiri dari SMP dan SMA yang dikelola dengan sistem Pesantren.

Penggabungan dua kurikulum, umum (Diknas) dan agama (pesantren) di hari dan jam efektif belajar, merupakan bentuk usaha MBS mencetak ulama intelektual dan intelektual ulama. Dengan cara itu, santri terpahaman akan pentingnya pelajaran agama dan umum dalam satu waktu. Mengunggulkan keduanya dan tanpa mengabaikan salah satunya.

Sebagai pencetak ulama intelektual dan intelektual ulama, MBS selalu mendorong dan memotivasi para santri untuk terus mendalami ilmu agama sebagai modal meniti kehidupan akherat. Namun disamping itu MBS tetap menekankan para santri untuk berprestasi dalam ilmu-ilmu non agama di berbagai bidangnya sebagai bentuk persiapan menghadapi tantangan hidup dunia yang global. Hal ini sesuai dengan pemahaman firman Allah SWT dalam Qur'an surat al Qhashash ayat 77 yang artinya sebagai berikut:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kami melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (Muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS, al Qashash: 77)

Jadi apa yang dilakukan MBS dengan memberikan materi yang seimbang adalah merupakan upaya untuk memahamkan para santri bahwa agama dan dunia adalah dua hal yang perlu diperhatikan. Dan menempatkan keduanya pada tempat yang tepat merupakan sebuah keharusan. Memahami keduanya, agama dan dunia, semua membutuhkan ilmu yang menunjang. Imam as Sayfii pernah menuturkan: “Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia, maka dia perlu ilmu. Dan siapa yang menginginkan kehidupan akherat, maka diapun membutuhkan ilmu. Dan siapa pun yang menginginkan keduanya, maka dia pun perlu ilmu.

Semangat MBS sebagai lembaga pencetak ulama intelektual dan intelektual ulama sangat erat kaitannya dengan nasihat K.H. Ahmad Dahlan yang sangat populer yang berbunyi: “Muhammadiyah pada masa sekarang ini berbeda dengan Muhammadiyah pada masa mendatang, karena itu hendaklah warga muda-mudi Muhammadiyah hendaklah terus menjalani dan menempuh pendidikan sertamenuntut ilmu pengetahuan (dan teknologi) di mana dan ke ma saja. Menjadilah dokter setelah itu kembalilah ke Muhammadiyah. Jadilah Master, Insinyur dan (professional) lalu kembalilah kepada Muhammadiyah sesudah itu”

Dengan lahirnya ulama intelektual dan intelektual ulama, MBS berkeyakinan Muhammadiyah akan mempunyai kader yang lebih dinamis, inovatif, kreatif dan tanggap terhadap perubahan, mempunyai visi masa depan, bekerja dengan cerdas, berani dan lincah dalam menghadapi permasalahan dan tantangan. Di samping itu, tetap istiqomah dan teguh dalam memegang prinsip perjuangan Muhammadiyah

Kedua, secara sosial, adanya kesadaran warga Muhammadiyah akan pendidikan kader ulama. Pada awalnya Meski Muhammadiyah sudah mempunyai sekolah kader ulama, seperti Muallimin, Muallimat, PUTM akan tetapi peminat dan sekolahnya masih sedikit, jika dibandingkan dengan keperluan kader da'i yang ada. Perlu adanya gerakan untuk mengajak kader Muhammadiyah bersekolah di ponpes dan sekolah kader ulama lainnya.

Seorang tokoh Muhammadiyah mengungkapkan bahwa peran lembaga-lembaga pencetak kader ulama ini amat sangat signifikan, setidaknya untuk memenuhi kader da'i dan ulama Muhammadiyah di berbagai pelosok nusantara. Tentunya pengelolaan lembaga-lembaga ini harus ditingkatkan, sehingga dapat menghasilkan ulama-ulama muda Muhammadiyah yang benar-benar memiliki wawasan keislaman yang mendalam, paham problematika kekinian dan loyal pada cita-cita Muhammadiyah. Salah satu yang perlu ditingkatkan dari lembaga-lembaga tersebut adalah sisi kurikulum, baik substansi materi keislaman maupun kemampuan penguasaan bahasa asing. Selain itu, mereka harus diarahkan supaya memiliki jaringan yang kuat, baik di lingkungan persyarikatan maupun di luar persyarikatan.

Berdasarkan hal tersebut maka menggerakkan kembali Ranting dan jama'ah sebagai basis gerakan Muhammadiyah menjadi penting. Disamping itu Menggerakkan kembali pengajian persyarikatan yang terstruktur (terprogram), kurikulum jelas dan tersedia nara sumber yang kompeten. Optimalisasi masjid wakaf muhammadiyah sebagai basis pembinaan warga persyarikatan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan organisasi otonom Muhammadiyah sebagai basis kader dan pimpinan Persyarikatan. Dan terakhir adalah pendataan kebutuhan kader (termasuk kader pengelola) cross cek dengan ketersediaan/potensi yang ada serta meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pengkaderan formal.

D. Simpulan

Berdasar pada uraian di atas, maka dapat diambil satu benang merah yang dapat dikemas dalam bentuk simpulan sebagai berikut:

Pertama Pemikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah beranggapan bahwa di Muhammadiyah memang terjadi terjadi krisis ulama, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi krisis da'i. Ulama yang dianggap krisis ini adalah ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama.

Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan adanya anggapan terjadi krisis Ulama di Muhammadiyah dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dimaksud adalah sifatnya kelembagaan. Kurang berfungsinya struktur kelembagaan di persyarikatan Muhammadiyah menyebabkan tidak berfungsinya lembaga-lembaga yang ada mulai dari tingkat Pusat hingga tingkat ranting. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pembentukan pola pikir yang ditinggalkan pemerintah colonial, menguatnya tarikan dan kepentingan politik yang masuk ke lingkungan Persyarikatan serta standar ulama di Muhammadiyah terlalu tinggi, sehingga tidak banyak yang bisa masuk kategori ini

Ketiga, *problem solving* untuk mengatasi terjadinya krisis Ulama di Muhammdiyah melalui kelembagaan maupun sosial. Secara kelembagaan, adanya kesadaran kolektif akan pentingnya pengkaderan ulama. Dan secara sosial, adanya kesadaran warga Muhammadiyah akan pendidikan kader ulama. Peneguhan kembali gerakan Muhammadiyah dan pada akhirnya perlu mendinamisasi kepemimpinan Persyarikatan di semua tingkatan (Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting). Meningkatkan bimbingan, arahan, dan panduan kepada seluruh tingkatan pimpinan dan warga Muhammadiyah, juga menggerakkan kembali ranting dan jama'ah sebagai basis gerakan Muhammadiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara*. Bandung. Mizan. 2004.
- Azra, Azumardi. *Pendidikan Islam Tradisi Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta. Logos Wacana Ilmu. 2002.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta : LP3ES, 1982.
- Djunaedi, Mabhub. *Nahdatul Ulma : Sejarah dan Politik*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1993.
- Kartodirdjo, Sartono. *Protest Movement in Rural Java*. Kualalumpur: Oxford, University Press, 1978.
- Kuntowidjoyo. *Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi*. Bandung. Mizan. 1991.
- Marzuki Wahid. *Pesantren Masa Depan : Wacana Pemberdayaan & Transparansi Pesantren*. Bandung. Pustaka Hidayah. 1999.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta : INIS, 1994.
- Mudzhar, Atho. *Pendekatan Studi Islam*. Yogyakarta Pustaka Pelajar : Cetakan IV, 2002.
- Mustofa Ya'kub, Ali, *Islam Masa Kini*, , Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001
- Madjid, Nurcholis. *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta : Paramadina, 1997.
- Raharjo, Dawam. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta : LP3ES, 1980.
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi: Esei-esai Pesantren*. Yogyakarta. LKiS. 2001.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Islam Masa Kini*. Jakarta. Pustaka Firdaus. 2001.
- Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Hasil Penelitia Pengkajian Pergeseran Literatur Pondok Pesantren Salafiyah*. Puslitbang Lektur Keagamaan, 2004.
- Profil Pondok Pesantren MBS Prambanan Kalasan.